

**ANALISIS KINERJA DAN RELASI BUPATI GROBOGAN DENGAN DPRD
KABUPATEN GROBOGAN DALAM
KEKOSONGAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
PERIODE 2016-2019**

Ivan Bachtiar

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof.H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74655405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.d> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country and knows a government system where a leader and his representative are elected by the public directly through elections. Election is a democratic party or people's party which becomes an arena of competition to fill political positions in government based on the formal choice of citizens who meet the requirements. Election of regional heads (Pilkada) directly held in the country since 2005, provides ample opportunity for voters to make their choices according to the wishes and conscience of each in the region.

In the 2015 elections there were only two candidates, namely incumbent candidate number 1 pair H. Icek Baskoro, S.H., M.H. and H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M. is the Incumbent Deputy Regent of Grobogan, and sequence number 2 is Sri Sumarni, S.H., M.M. and Edy Maryono, S.H., M.M. who were former candidates for the previous Regent. Regent of Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. in carrying out the duties of government by themselves or 'single leader'. Within the leadership of Grobogan Regent Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. carrying out his administrative duties assisted by regional secretaries and staff in the government. As Regional Head Mrs. Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. in his government he made many changes in his leadership.

The research method used by researchers is a qualitative research method. The results of the study are related to the analysis of the performance and relations of the Grobogan Regent with the Grobogan District DPRD in the Grobogan District Deputy vacuum in the 2016-2019 period in this study. Researchers try to dig data about performance by using indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability and analysis of power relations. The performance of the Grobogan Regent in the vacancy of the Deputy Grobogan Regent in the 2016-2019 Period can be said to be successful in referring to the results of the rapid increase in regional development.

Keywords: Performance, Power Relations

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokratis dan mengenal sistem pemerintahan dimana seorang pemimpin dan wakilnya dipilih oleh masyarakat

secara langsung melalui pemilu. Pemilu adalah pesta demokrasi atau pesta rakyat yang menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada

Pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada di daerah. Disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang tersebut yaitu, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Dengan demikian Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2005 dan setelahnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Pilkada tahun 2015 terdapat hanya dua calon, yaitu calon Petahana nomor urut 1 pasangan H. Icek Baskoro, S.H., M.H. dan H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M. diusung dari Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Gerindra yang merupakan *Incumbent*

Wakil Bupati Grobogan, dan nomor urut 2 pasangan Sri Sumarni, S.H., M.M. dan Edy Maryono, S.H., M.M. diusung dari PDIP, PKB, Partai Hanura, PAN, yang merupakan mantan calon Bupati sebelumnya. Sejak 2016 Kabupaten Grobogan dipimpin oleh seorang Bupati bernama Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. beliau menjabat mulai tanggal 21 Maret 2016 beliau lahir di Grobogan, 5 September 1960. Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan sendiri atau 'single leader'. Di dalam kepemimpinan Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu dengan sekretaris daerah dan jajarannya di dalam pemerintahan. Sebagai Kepala Daerah Ibu Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. dalam pemerintahannya beliau melakukan banyak perubahan di dalam kepemimpinannya. Salah satu contohnya Ibu Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. sudah melakukan perubahan di infrastruktur jalan yang sekarang ini banyak mengalami perubahan dan perbaikan di setiap desa ke desa lain.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok

melalui wawancara pada informan terkait yaitu Bupati Grobogan, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan partai politik, Sekda bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas DPUPR, ASN Kabupaten Grobogan. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambah data arsip, dokumen, pendukung lainnya yang kemudian dilakukan analisis dari sumber data yang di peroleh.

PEMBAHASAN

Analisis kinerja dan relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan dalam kekosongan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2019 dalam penelitian ini, peneliti memakai rujukan milik Agus Dwiyanto (2006 : 50) untuk menganalisis kinerja dan hubungan relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan. Peneliti mencoba menggali data-data mengenai Kinerja yaitu dengan menggunakan indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas serta analisis Relasi Kekuasaan.

Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO)

mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2016 – 2019 telah menunjukkan hasil kinerja yang baik dilihat dari indikator produktivitas pemerintah dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Pembangunan pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Grobogan sudah meningkat hampir 70% dari sebelumnya. Sementara Pemkab berfokus pada infrastruktur fisik berupa jalan, jembatan, irigasi, waduk. Peningkatan dalam semua sektor pembangunan relatif meningkat, pemerintah bisa meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan – pembangunan infrastruktur didaerah-daerah. Otomatis angka kemiskinan mulai sedikit demi sedikit terkikis dengan hadirnya pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Pembangunan Infrastruktur menjadi kunci penting dalam awal pembangunan ekonomi, tentu disertai dengan pembangunan Sumber Daya Manusia yang menjadi potensi utama untuk kemajuan daerah. Kinerja lembaga Eksekutif dan Legislatif didaerah sangat baik dengan adanya beberapa peraturan daerah yang telah dirumuskan oleh DPRD

dan Bupati Grobogan, beberapa peraturan yang ada sesuai dengan program yang direncanakan oleh DPRD.

Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Agus Dwiyanto (2006 : 50) Pemerintah Kabupaten Grobogan mencoba untuk memberikan kualitas layanan kepada masyarakat Grobogan guna menciptakan kualitas yang baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, waktu yang dibutuhkan untuk proses pelayanan publik di Kabupaten Grobogan ternyata cukup cepatmaksimal 3 (tiga) hari, tergantung layanan publik yang bagaimana, biasanya bisa dipercepat, karena telah ada pelayanan terpadu 1 (satu) pintu. Dengan penggunaan system IT dalam proses pelayanan di Kabupaten Grobogan juga mempercepat pelayanan.

Responsivitas

Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Grobogan tidak ada diskriminatif, dilayani sesuai prosedur yang ada guna mengedepankan asas keadilan dan persamaan. Semua diperlakukan dengan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masing-masing instansi penyedia jasa layanan. Terkait tindak lanjut pemerintahan Kabupaten Grobogan dalam mengatasi keluhan yang ada di masyarakat Grobogan, Setelah ada keluhan tentunya OPD akan segera mencari info tentang kebenaran keluhan tersebut, kemudian ditangani oleh OPD – OPD bersangkutan, jika menyangkut kebijakan bisa kepada Bupati langsung.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Terdapat

penggunaan system IT dan juga sosial media dalam menanggapi keluhan yang ada di masyarakat Kabupaten Grobogan yaitu melalui media sosial (Instagram, fb, twitter dll). Selain itu terdapat *Standart Operasional Prosedure* (SOP) dalam melakukan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan pasti ada tergantung kebutuhan dan dikendalikan oleh OPD yang bersangkutan, dan pemerintah mengawasi secara langsung. Semua pelayanan public sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan memang ada dalam pelaksanaannya kami tentu fleksibel manakala ada permasalahan yang harus secara cepat tertangani.

Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.

Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam bekerja sudah sesuai dengan sumpah jabatan, tanggungjawab, dan kode etik sesuai dengan SOP yang berlaku, yang menyangkut tentang jabatan tanggungjawab dan kode etik. Disamping itu kedisiplinan diterapkan oleh pejabat politik yang telah dipilih oleh rakyat. Selama ini belum ada keluhan masyarakat mengenai hal tersebut. Berarti menandakan Pemerintah Daerah bekerja sudah disiplin, dan setiap pagi melakukan apel sebelum memulai kerja. Serta ada penggunaan absen *finger print* atau absen online langsung masuk database kepegawaian.

Relasi Kekuasaan

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam ilmu politik. Dalam politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan, seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force dan kewenangan. Kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat umum. Politik dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian (Surbakti, 1992).

Interaksi antara Bupati Grobogan dengan DPRD Grobogan terkait perumusan kebijakan adalah sangat baik, terbukti dengan adanya perumusan peraturan daerah yang di rumuskan dan serta kemajuan pembangunan daerah yang begitu pesat, jadi hubungannya sangat baik dan harmonis. Demikian interaksi antara Bupati Grobogan dengan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Grobogan juga sangat baik, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan yang mengerjakan kebijakan guna mewujudkan kebijakan tersebut, jadi hubungan ASN dengan Bupati sangatlah baik, terbukti dengan adanya perumusan daerah yang di rumuskan dan serta kemajuan pembangunan daerah yang begitu pesat, semua bekerja sama dengan baik.

Dengan demikian Kinerja dan Relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan dalam Kekosongan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2019 sangatlah baik, setelah diukur dari

indicator kinerja dan analisis relasi kekuasaan berupa komunikasi intens dua arah antara Bupati dengan DPRD, Bupati dengan Aparatur Sipil Negara serta Bupati dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Kinerja dan Relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan sangatlah baik dan harmonis. Capaian pembangunan serta prestasi menjadi bukti konkrit keberhasilan kinerja dan relasi Bupati Grobogan kepada DPRD Kabupaten Grobogan. Meskipun Bupati Grobogan tidak didampingi oleh Wakil Bupati Grobogan selama 1 (satu) periode penuh selama 5 (lima) tahun menjabat, tetapi capaian pembangunan serta prestasi daerah Kabupaten Grobogan tidak diragukan lagi, bahkan mencapai angka optimal dalam pengerjaan kemajuan daerah. Kunci dari kesemuanya itu adalah komunikasi yang baik antara lembaga Eksekutif yaitu Bupati serta ASN dan lembaga legislatif yaitu DPRD, yang mengedepankan prinsip Gotong Royong bersama-sama bekerja demi kemajuan daerah Kabupaten Grobogan secara utuh dan menyeluruh.

PENUTUP

SIMPULAN

Dalam skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa relasi hubungan antara Bupati Grobogan dan DPRD dalam kekosongan wakil Bupati Grobogan tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Kinerja Bupati Grobogan dalam kekosongan Wakil Bupati Grobogan Periode 2016-2019 dapat dikatakan berhasil merujuk pada hasil-hasil peningkatan pembangunan daerah yang cukup pesat. Memang terbukti pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Grobogan. Walaupun dalam hal ini beliau Ibu Bupati bekerja secara sendiri tanpa didampingi oleh figur Wakil Bupati, tetapi dengan relasi dan kinerja yang optimal bersama dengan lembaga terkait yaitu dengan mitra eksekutif atau yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif.

Relasi antara Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan Dalam kekosongan Wakil Bupati Grobogan Periode 2016-2019 sangat baik dan harmonis, terlepas dari kesamaan warna partai politik antara Bupati dan Ketua DPRD. Hubungan antara kedua belah pihak sangatlah baik, kerjasama diberbagai bidang untuk pembangunan daerah telah terlaksana dengan baik. Asalkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Grobogan, semua bekerja dengan Gotong Royong penuh tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan kemajuan daerah. Peraturan-peraturan daerah yang terbentuk menjadi salah satu bukti kekompakan lembaga Eksekutif dan

Legislatif, selain dengan fungsi-fungsi lain seperti anggaran dan pengawasan.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil diatas maka saran yang disampaikan oleh penulis untuk pihak yang terkait hubungan antara Bupati Grobogan dan DPRD dalam kekosongan wakil Bupati Grobogan tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut, direkomendasikan supaya Bupati dan DPRD lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang baik secara konkrit dan ilmiah yang nanitnya dapat dijadikan sebagai pendidikan politik kepada masyarakat umum serta Ilmuan Politik, juga menjadi semangat bagi masyarakat kabupaten Grobogan untuk ikut serta membangun daerah.

Selain dari pada kerjasama, perlu adanya keselarasan dalam hubungan politik dimana hubungan antara partai – partai pengusung Bupati terpilih dapat menentukan pengganti Wakil Bupati terpilih yang meninggal dunia, agar tugas – tugas pembangunan lebih tercapai dengan baik dan efektif serta penggunaan anggaran daerah juga terserap dengan baik. Meskipun kekosongan Wakil Bupati tidak begitu berdampak dalam masa pemerintahan Bupati Sri Sumarni, tetapi hal ini tidak dirasa kurang efektif, mengingat pekerjaan seorang kepala daerah sangatlah banyak, ditambah dengan kondisi geografis serta populasi penduduk

dikabupaten Grobogan juga tinggi, maka diharapkan periode-periode selanjutnya tidak terulang hal semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Duverger, Maurice. 2007. *Sosiologi Politik. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Grafika, Redaksi. Sinar. 2008. *Peraturan Lengkap Pilkada*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu*. Yogyakarta : Gava media.
- KPU Kabupaten Grobogan. 2014. *Pemilu 2014 dalam angka. Profil Dewan Terpilih Kabupaten Grobogan 2014*. KPU Kabupaten Grobogan.
- KPU Kabupaten Grobogan. 2015. *Hasil Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2015*. KPU Kabupaten Grobogan. Grobogan.
- Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nimmo, Dan. 2009. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Surbakti, Rilan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo